



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

**Tahun 2016 - 2021**

**Palangka Raya**  
**2017**

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenaan -Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 merupakan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman selama 5 tahun kedepan.

Sejalan dengan Misi-3 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang merupakan salah satu pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 pada Misi-2, dimana agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan merupakan fokus sektor-sektor termasuk diantaranya sektor perikanan, maka upaya peningkatan produksi perikanan masih dijadikan sebagai sasaran utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan, selain upaya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan, serta pengelolaan sumberdaya demi terjaminnya keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan itu sendiri. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan, mengingat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi pengembangan perikanan, terutama budidaya, demi mewujudkan kemandirian pangan terutama yang bersumber dari perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan prioritas yang ditetapkan antara lain pada peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, konsumsi ikan, penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir dan laut, dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Semoga Renstra ini dapat menjadi arah dan pedoman serta tuntunan dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bagi semua *stakeholder* kelautan dan perikanan di Kalteng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di lain hal, kita menyadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 merupakan produk yang masih akan memiliki kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun akan sangat kami harapkan demi perbaikan dan review/ revisi yang dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Palangka Raya, Pebruari 2017

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,

**Ir. EFRENSIA L. P. UMBING, M.Si**  
NIP. 19600204 198412 2 004

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah .....	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah .....	II-8
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah .....	II-14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah .....	II-17
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah .....	III-1
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-3
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-8
3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis .....	III-9
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah .....	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah .....	IV-6
<b>BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>V-1</b>
5.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	V-1
5.2 Indikator Kinerja .....	V-4
5.3 Kelompok Sasaran .....	V-7
5.4 Pendanaan Indikatif .....	V-7
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b> .....	<b>V-1</b>
6.1. Indikator Kinerja .....	VI-1

**BAB VII PENUTUP ..... VII-1**

# Bab PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Berbagai bentuk peraturan daerah yang mengatur rencana pembangunan di daerah berupa Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, dan Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017.

Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai institusi pemerintah yang disertai kewenangan menangani sektor kelautan dan perikanan, secara khusus menempatkan 3 pilar misi pembangunan kelautan, yaitu **kedaulatan (sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang

berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; **keberlanjutan (*sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan **kesejahteraan (*prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Pemahaman mengenai misi KKP dimaksud membawa sektor kelautan dan perikanan ke tahapan lebih lanjut, yaitu pementapan bagian hilir atau *hilirisasi* demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menyiapkan daya saing produk di level nasional dan internasional. Pilihan ini tidaklah berlebihan mengingat Indonesia memiliki kawasan-kawasan yang memegang tradisi kelautan dan perikanan cukup mapan sejak jaman dahulu, ini dibuktikan dengan World Resources Institute (1998) yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki pantai yang cukup panjang mencapai 95.181 km, luas wilayah laut 5,4 juta km<sup>2</sup>, dominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km<sup>2</sup>. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Dalam hal hubungannya terhadap pemanfaatan secara optimal sumberdaya perikanan yang ada, KKP tetap memberikan fokus terhadap keberadaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya sebagai *stakeholder* yang terkait langsung dengan keberadaan produksi perikanan. Bahkan langkah lanjutan sudah dimasukkan dalam target KKP 5 tahun ke depan, yaitu peningkatan daya saing produk dan pengendalian pemanfaatan

sumberdaya yang bertanggung jawab sehingga menciptakan keberlanjutan (*sustainability*) keberadaan sumberdaya secara alami demi tetap terjaminnya pula keberlanjutan pemanfaatan menuju kesejahteraan semua pelaku sektor kelautan dan perikanan.

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya terletak di daerah khatulistiwa, yaitu 0°45' Lintang Utara dan 03°30' Lintang Selatan serta 111° - 116° Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km<sup>2</sup>. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan 1 kota, dengan 136 kecamatan, 138 kelurahan, serta 1.421 desa. Pantai laut di selatan Kalimantan Tengah merangkai 7 (tujuh) kabupaten mulai dari Sukamara di barat hingga Kapuas di timur dengan panjang garis pantai ± 750 km dan potensi laut Kalimantan Tengah sebesar 94.500 km<sup>2</sup> memiliki berbagai jenis ikan pelagis, udang, rajungan, dan lainnya. Selain itu, Kalimantan Tengah juga memiliki kawasan andalan laut yang kaya akan potensi ikan, yakni perairan laut Kuala Pembuang. Sedangkan perairan umum dengan luas ± 2,29 juta Ha dengan potensi sumberdaya ikannya yang cukup besar perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara baik. Pengelolaan dan pemanfaatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan lingkungannya dan diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cakap serta didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup dan memadai.

Kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dengan mengacu kepada Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD. Dengan pertimbangan dimaksud, maka Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan pilihan kelautan dan perikanan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Renstra disusun dengan maksud memberikan menjadi arahan dan pedoman serta tuntunan dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bagi semua *stakeholder* kelautan dan perikanan di Kalteng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor kelautan dan perikanan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi harus mampu

mengadaptasikan diri melalui perencanaan program/ kegiatan menuju kemandirian (sebagai langkah awal menuju kedaulatan), keberlanjutan, dan kesejahteraan dengan tetap bertitik tolak kepada kemampuan dan kearifan lokal yang dimiliki. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan capaian kinerja yang berorientasi kepada hasil (*outcome*).

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Oleh karenanya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan kelautan dan perikanan, sehingga diharapkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan akan berjalan lebih efektif dan efisien.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti:

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Suatantara Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Suratatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Negara Nomor 1622);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Standar Pelayanan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor ..., tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ...); dan
21. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 49).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud agar dijadikan panduan dan alat kontrol dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, disamping itu berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sampai 5 tahun ke depan, sehingga merupakan suatu dokumen yang strategis dalam menentukan prioritas – prioritas pembangunan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

- a. Mengetahui rencana capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan;** berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;** berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB III Isu-Isu Strategis;** berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

**BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan;** berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021.

**BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif;** berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD;** berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

**BAB VII Penutup**

# Bab



## GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari tugas tersebut dapat diketahui fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan

- ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur

### **2.1.1. Organisasi SKPD**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut:

#### **1) Kepala Dinas**

#### **2) Sekretariat;** terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Perencanaan Program
- b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

#### **3) Bidang- Bidang;** terdiri dari :

- a. Bidang Kelautan dan Pesisir, membawahkan :
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
  - Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan
  - Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
- b. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
  - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
  - Seksi Usaha Perikanan Tangkap
  - Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- c. Bidang Budidaya, Pengolahan, Pemasaran membawahkan :
  - Seksi Perikanan Budidaya
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran

- Seksi Standarisasi Usaha
- d. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
  - Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan
  - Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
  - Seksi Penanganan Pelanggaran

**4) Cabang Dinas/ UPTD meliputi :**

- a. UPTD. LPPMHP-PIL Palangka Raya
  - Seksi Pengendalian dan Pengujian Mutu
  - Seksi Pelayanan Teknis, Standarisasi Benih
  - Sub Bagian Tata Usaha

**2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi bagian, bidang, UPTD lingkup dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah masing-masing sebagai berikut:

**1. Tugas Pokok**

Dari susunan struktur organisasi yang telah terbentuk diatas maka di setiap bagian, bidang, UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat;** Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penghimpun bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Kelautan dan Perikanan serta perencanaan anggaran;
  - b. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - c. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
  - e. Pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**2) Bidang Kelautan dan Pesisir;** Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Kelautan dan Pesisir. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang kelautan dan pesisir;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang kelautan dan pesisir;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan, dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam fungsi di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan pesisir;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan pesisir;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**3) Bidang Perikanan Tangkap;** Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Tangkap, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**4) Bidang Budidaya, Pengolahan, Pemasaran;** Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, standardisasi usaha, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Budidaya, Pengolahan, Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;

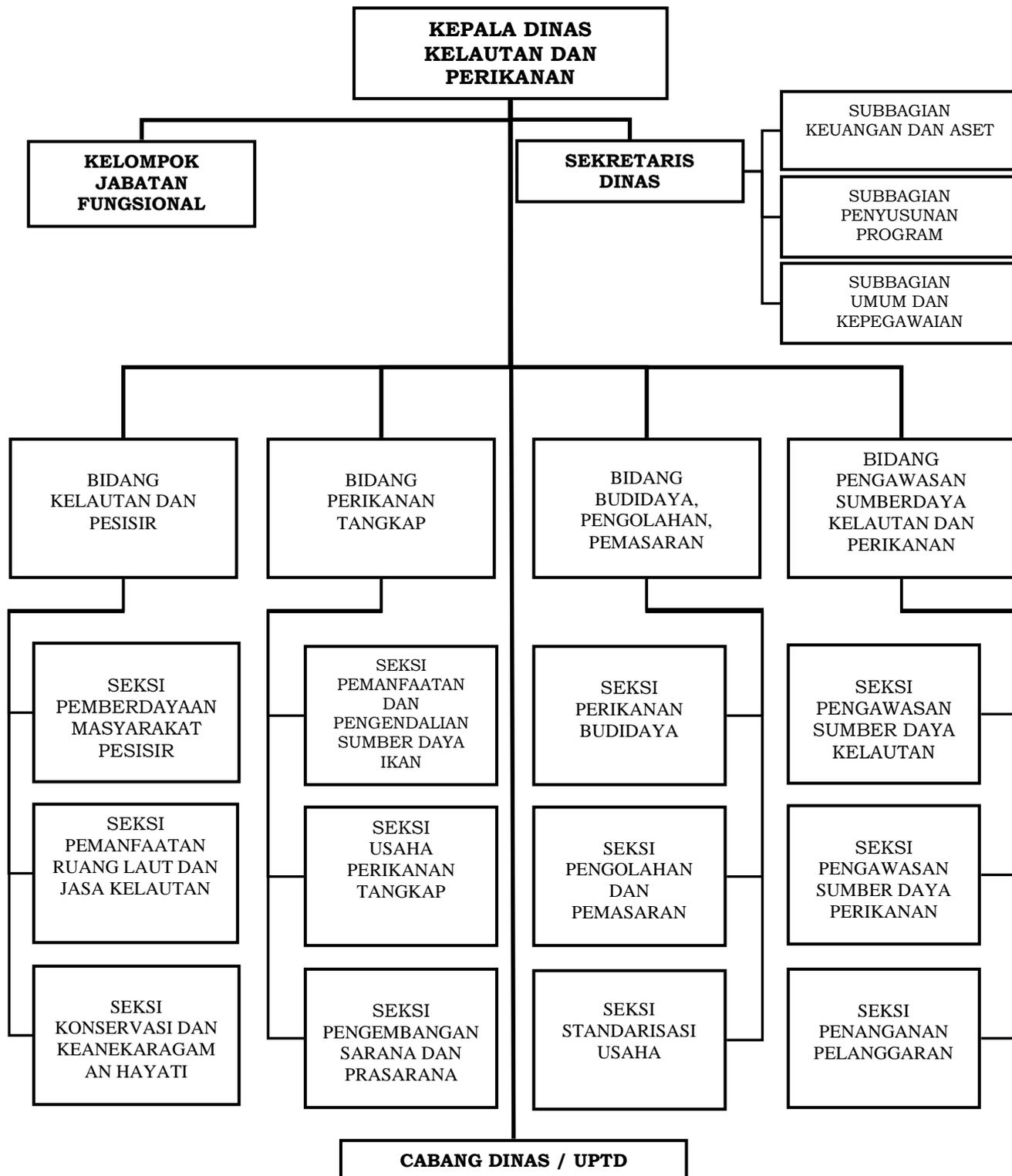
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- 5) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;** Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran;
  - c. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- 6) UPTD LPPMHP-PIL Palangka Raya;** mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembinaan, pengawasan terhadap penerapan program manajemen mutu terpadu hasil perikanan, melaksanakan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir, penerapan teknik perbenihan budidaya ikan air tawar dan pelestarian sumberdaya ikan komoditas lokal dan lingkungan perairannya, Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan, dan perbenihan ikan lokal.
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan, dan perbenihan ikan lokal.
  - c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengujian laboratoris, penerapan teknik perbenihan dan distribusi.
  - d. Mengoordinasikan pengendalian dan pengawasan mutu benih melalui sertifikasi sistem mutu benih.
  - e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.
  - f. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas
  - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**



**2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

**1) Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1

**Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	14	5	19	
3	Diploma Satu (D-1)	-	-		
4	Diploma Tiga (D-3)	1	2	3	
5	Diploma Empat (D-4)	10	1	11	
5	Sarjana (S-1)	25	27	52	
6	Sarjana (S-2)	8	10	18	
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>45</b>	<b>103</b>	

*Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2015*

Dari jumlah pegawai sebanyak 103 karyawan ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Pangkat golongan yang memiliki angka minoritas adalah golongan IV/d dengan jabatan Pembina Utama Madya sebanyak 1 orang.

**Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/d Juru Muda				
2	II/a Pengatur Muda	3	-	3	
3	II/b Pengatur Muda Tk. I	5	-	5	
4	II/c Pengatur	4	3	7	
5	II/d Pengatur Tk. I	-	1	1	
6	III/a Penata Muda	8	3	11	
7	III/b Penata Muda Tk.I	23	18	41	
8	III/c Penata	4	6	10	
9	III/d Penata Tk. I	5	5	10	
10	IV/a Pembina	4	4	8	
11	IV/b Pembina Tk. I	2	4	6	
12	IV/d Pembina Utama Madya	1	-	1	
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>45</b>	<b>103</b>	

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2015

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 2.3 jabatan eselon II adalah jabatan tertinggi dan belum ada karyawan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang menjabatnya.

**Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II.A	1	-	1
2	Eselon III.A	2	4	6
3	Eselon IV.A	9	9	18
4	Fungsional	47	31	78
5	Non Struktural / Fungsional	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>45</b>	<b>103</b>

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2015

**Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari APBD maupun APBN.

**Tabel 2.4**  
**Perlengkapan Penunjang**

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Rusak	
1	Kantor	2 Unit (termasuk 1 UPTD)	√		
2	Meja Kerja	53 Buah	√		Chek kembali
3	Kursi Kerja	83 Buah	√		Chek kembali
4	Kursi Sofa	5 Buah	√		Chek kembali
5	Lemari Arsip	29 Buah	√		Chek kembali
6	Filling Kabinet	18 Buah	√		Chek kembali
7	Brankas	5 Buah	√		Chek kembali
8	AC	18 Buah	√		Chek kembali
9	Kipas Angin	3 Buah	√		Chek kembali
10	Personal Computer	6 Buah	√		Chek kembali
11	Ploter	Buah			Chek kembali
12	Printer	10 Buah	√		Chek kembali
13	Laptop	14 Buah	√		Chek kembali
14	Kamera Photo	2 Buah	√		Chek kembali
15	Mesin Tik	6 Buah	√		Chek kembali
16	Alat Lab	Buah	√		Chek kembali
17	Kendaraan Dua Roda	10 Buah	√	-	Chek kembali
18	Kendaraan Empat Roda	5 Buah	2	3	Chek kembali
19	LCD	2 Unit	√		Chek kembali
20	Handycam	Buah			Chek kembali

Sumber : Data Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2015

**2) Keuangan**

**a. Sumber Dana APBD 2011 s/d 2015**

Total pagu anggaran APBD (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) dari tahun 2011-2015 Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.122.617.761.136,-. pagu anggaran per tahun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2011 pagu anggaran sebesar Rp.16.230.023.492,- dan pada Tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 27.505.831.466,- atau meningkat sebesar 53,99%, sedangkan persentase rata-

rata peningkatan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode tahun 2011 – 2015 adalah sebesar 14,94%. Sedangkan untuk realisasi keuangan juga mengalami fluktuasi pada tahun 2011 realisasi keuangan mencapai 90,87%, tahun 2012 mencapai 88,54%, tahun 2013 mencapai 90,70%, tahun 2014 mencapai 94,42% dan pada tahun 2015 sampai dengan akhir tahun mencapai 94,22%. Untuk rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2011	17.861.623.968	16.230.023.492	90,87
2012	24.071.387.699	21.313.985.140	88,54
2013	26.079.843.600	23.653.673.038	90,70
2014	27.099.074.403	25.587.346.824	94,42
2015	27.505.831.466	25.930.091.704	94,22
<b>Total</b>	<b>122.617.761.136</b>	<b>112.715.120.198</b>	<b>91,92</b>

*Sumber : Data Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2015*

**b. Sumber Dana APBN 2011 s/d 2015**

Selain mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah juga memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berupa anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang terbagi dalam beberapa Satker. Total anggaran APBN (Dekonsentrasi Tugas Pembantuan) selama periode 2011 – 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 66.800.384.000,- pagu anggaran per tahun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2011 pagu anggaran sebesar Rp. 12.562.451.000,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 10.048.816.000,- atau menurun sebesar 25,04%, sedangkan persentase rata-rata penurunan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan melalui APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) selama periode tahun 2011 – 2015 adalah sebesar 1,78%. Sedangkan untuk realisasi penyerapan keuangan juga mengalami fluktuasi pada tahun 2011 realisasi keuangan mencapai 87,69%, tahun 2012 mencapai 86,55%, tahun 2013 mencapai 93,22%, tahun 2014 mencapai 91,32% dan pada tahun 2015 diperkirakan hanya mencapai ± 90%. Adapun rincian pagu dan realisasi per tahun sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi APBN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015**

**Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaliman Tengah**

Nama Satker	2011		2012		2013		2014		2015		Total DK dan TP (5 Tahun)	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>A. Satker DK Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng</b>												
1. Sat. Setjen	678.000.000	602.379.363	950.000.000	733.513.700	992.220.000	902.359.235	300.000.000	296.507.860	446.532.000	226.274.018	3.366.752.000	3.035.969.176
2. Sat. Ditjen Perikanan Tangkap	1.372.987.000	1.042.704.840	1.372.987.000	1.042.704.840	1.915.740.000	1.570.144.800	1.748.421.000	1.350.616.650	2.995.529.000	963.549.957	9.405.664.000	7.185.132.487
3. Sat. Ditjen Perikanan Budidaya	2.285.072.000	1.907.955.420	2.050.229.000	1.647.185.150	1.474.525.000	1.387.822.930	1.966.205.000	1.752.579.420	1.638.600.000	536.342.000	9.414.631.000	8.115.380.928
4. Sat. Ditjen PSDKP	372.840.000	264.694.800	372.840.000	264.694.800	566.800.000	519.343.400	412.660.000	404.064.100	699.482.000	492.674.464	2.424.622.000	2.135.513.000
5. Sat. Ditjen P2HP	1.260.932.000	974.832.060	1.260.932.000	974.832.060	1.311.244.000	1.011.328.962	1.161.768.000	1.017.646.450	1.403.233.000	574.159.300	6.398.109.000	5.145.437.082
6. Sat. Ditjen KP3K	885.950.000	791.912.700	1.100.600.000	930.944.300	1.508.000.000	1.435.766.800	1.265.000.000	1.124.489.600	869.000.000	516.357.700	5.628.550.000	5.095.067.100
7. Sat. Ditjen BPSDM	0	0	945.475.000	840.020.900	0	0	0	0	0	0	13.622.735.000	12.735.742.217
<b>B. Satker TP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng</b>												
1. Sat. Ditjen Perikanan Tangkap	3.000.000.000	2.953.536.600	3.000.000.000	2.965.536.600	4.500.000.000	4.426.711.117	3.182.820.000	3.159.739.600	0	0	8.992.740.000	8.357.820.900
2. Sat. Ditjen Perikanan Budidaya	2.706.670.000	2.477.610.600	3.394.031.000	2.840.690.800	2.364.275.000	2.127.847.500	921.795.000	786.826.200	1.994.440.000	1.355.734.000	3.514.031.000	2.954.690.800
3. Sat. Ditjen P2HP	0	0	3.025.000.000	2.895.168.455	120.000.000	114.000.000	0	0	0	0	3.025.000.000	2.895.168.455
<b>Total DK dan TP Pertahun</b>	<b>12.562.451.000</b>	<b>11.091.626.383</b>	<b>17.472.094.000</b>	<b>15.135.351.065</b>	<b>14.752.804.000</b>	<b>13.495.324.752</b>	<b>10.958.669.000</b>	<b>9.982.469.880</b>	<b>10.046.816.000</b>	<b>8.041.149.525</b>	<b>65.792.834.000</b>	<b>57.655.922.145</b>

Sumber : Data Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2015

### **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD**

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2011 – 2015) masih belum maksimal, namun demikian beberapa Kinerja pembangunan telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Berikut ini beberapa hasil kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2011-2015.

#### **2.3.1. Produksi Perikanan**

Produksi Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya pada Tahun 2011 sebesar 113.555 ton selanjutnya pada akhir Tahun 2015 menjadi 199.219,85 ton terjadi peningkatan sebesar 85.6653 ton atau sebesar 43,00 %.

Dari jumlah keseluruhan produksi perikanan Kalimantan Tengah selama periode 2011 – 2015 produksi perikanan tangkap memberikan kontribusi terbesar yaitu yakni sebesar 66,49%, sedangkan produksi perikanan budidaya memberi kontribusi sebesar hanya 33,51%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan produksi perikanan Kalimantan Tengah pada selama tahun 2011 – 2015 sebesar 14,37 % per tahun, laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 21,05 %, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi perikanan tangkap yang hanya mencapai 11,53 %. Laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya didominasi oleh peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar khususnya untuk budidaya kolam dan keramba yang meningkat cukup tajam, sedangkan untuk produksi budidaya air payau peningkatannya cukup stabil.

Untuk produksi perikanan perikanan tangkap peningkatan terjadi pada produksi perikanan laut, beberapa faktor pendorong terjadinya peningkatan produksi perikanan laut salah satunya adalah penambahan beberapa armada penangkapan yang bertonase di atas 30 GT melalui program INKAMINA.

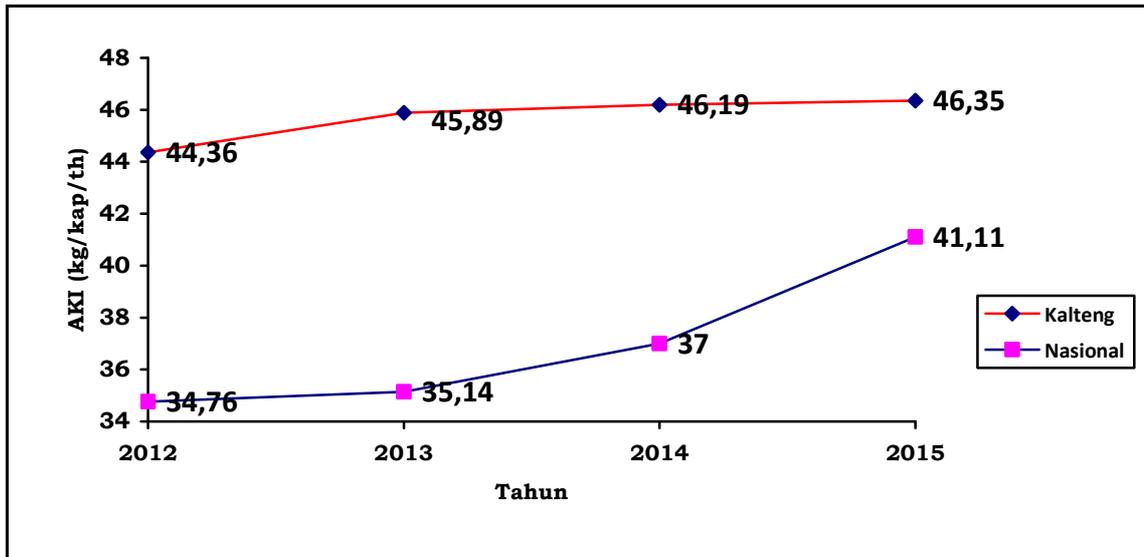
**Tabel 2.7. Perkembangan Produksi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Penangkapan</b>	<b>81.572,1</b>	<b>94.954,1</b>	<b>101.891,8</b>	<b>104.082,2</b>	<b>130.526,10</b>
- Laut	52.122,6	46.398,7	66.311,8	66.383,9	96.946,20
- Perairan umum	40.156,7	35.173,4	35.580,0	37.698,3	33.579,90
<b>Budidaya</b>	<b>31.983,16</b>	<b>42.441,28</b>	<b>54.600,07</b>	<b>60.848,59</b>	<b>68.693,75</b>
- Laut	198,75	230,39	87,51	338,75	364,43
- Tambak	5.185,56	6.807,29	9.244,47	10.745,42	11.533,01
- Kolam	12.663,44	18.419,42	21.448,13	22.783,96	28.510,30
- Karamba	13.726,15	16.655,37	22.954,26	26.395,33	27.967,79
- Jaring Apung	206,97	324,48	862,65	585,12	218,23
- Budidaya Sawah	2,29	4,33	3,05	-	-
- Ikan Hias	-	-	-	-	-

Sumber data : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya, 2011-2015

### 2.3.2. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Masyarakat

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah selama periode tahun 2011-2015 selalu menunjukkan *trend* kenaikan setiap tahunnya. Data juga menunjukkan bahwa Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kalteng selalu berada di atas AKI Nasional. Pada Tahun 2012 tingkat konsumsi ikan di Kalimantan Tengah adalah 44,36 kg/kap/tahun, sedangkan AKI Nasional tercatat 34,76 kg/kap/tahun. Selanjutnya pada Tahun 2013 AKI Kalteng menjadi 45,89 kg/kap/tahun dan AKI Nasional 35,14 kg/kap/tahun. Pada Tahun 2014 AKI Kalteng kembali meningkat 0,30 kg/kap/tahun menjadi 46,19 kg/kap/tahun, tetap lebih tinggi daripada AKI Nasional yaitu 37 kg/kap/tahun. Data AKI tervalidasi terakhir di Tahun 2015 AKI Kalimantan Tengah tetap mengalami peningkatan mencapai 46,35 kg/kap/tahun, dengan AKI Nasional 41,11 kg/kap/tahun.



**Gambar 2.1 Grafik Perkembangan AKI Kalteng dan Nasional Tahun 2012-2015**

Peningkatan ini disinyalir sebagai salah satu dampak pelaksanaan program/ kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang juga diikuti dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Namun ada catatan yang harus diperhatikan ke depannya, bahwa peningkatan konsumsi ikan masyarakat per kapita di Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir yang tercatat rata-rata 0,66%, berada di bawah angka rata-rata peningkatan nasional yang mencapai 2,12%. Hal ini disinyalir terjadi mengingat tidak meratanya AKI masyarakat kabupaten/ kota se-Kalteng, sebagai contoh AKI masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang mencapai 50 kg/kap/ tahun sementara itu rata-rata AKI masyarakat di kabupaten-kabupaten DAS Barito cuma berkisar 35-40 kg/kap/tahun.

### **2.3.3. Perkembangan Pembudidaya ikan / Nelayan**

Perkembangan tenaga kerja pembudidaya ikan dan nelayan di Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi, secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja khususnya pembudidaya dan nelayan selama periode tahun 2011 – 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,58% dimana pada 2011 sebanyak 172.385 orang menjadi 224.391 orang pada tahun 2015. Untuk pembudidaya ikan mengalami peningkatan sebesar 0,21 % yaitu dari 80.600 orang pada tahun 2011 menjadi 81.945 pada tahun 2015. Sedangkan untuk jumlah nelayan di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan 4,93%, yaitu pada tahun 2011 sebesar 91.785 orang menjadi 142.446 orang pada tahun 2015.

**Tabel 2.8. Perkembangan jumlah tenaga kerja pembudidaya dan Nelayan di Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Nelayan (org)	91.785	81.015	62.311	72.280	142.446
- N. Perairan Laut	65.706	69.799	50.276	60.467	60.501*)
- N. PUD	26.079	11.216	12.035	11.813	81.945*)
Pembudidaya (Org)	80.600	88.464	81.248	81.404	81.945*)
<b>Total</b>	<b>172.385</b>	<b>169.479</b>	<b>143.559</b>	<b>153.684</b>	<b>224.391</b>

Sumber data : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya, 2011-2015

#### 2.3.4. Perkembangan Tindak Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kasus *illegal fishing* di perairan Kalimantan Tengah selama periode tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif dimana pada Tahun 2011 terjadi 6 kasus, menjadi 3 kasus pada Tahun 2012 (menurun 50%), kembali menurun pada Tahun 2013 dengan hanya terjadi 2 kasus, namun pada Tahun 2014 sampai 2015 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yakni masing-masing 15 kasus.

Pada periode Tahun 2011 – 2013 kasus *illegal fishing* umumnya terjadi pada Daerah Aliran Sungai (di perairan umum daratan) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas dengan jenis pelanggaran pada umumnya adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat *Stroom*. Sedangkan pada Tahun 2014 – 2015, kasus pelanggaran lebih banyak terjadi di perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan berupa adalah penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti Jaring Cantrang, Jaring Apollo dan Lampara Dasar. Pada tahun yang sama, kasus pelanggaran di perairan umum yang ditemukan terjadi di kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara, dengan jenis pelanggaran berupa penggunaan alat *Stroom* dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun.

Jumlah kasus yang ditemukan selama periode 5 (lima) tahun terakhir adalah 41 kasus Tindak Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan 12 kasus yang telah dilimpahkan ke Pengadilan sedangkan 29 kasus hanya diberikan pembinaan.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015**

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN														
		2011			2012			2013			2014			2015		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/Tahun)	103.264,30	96.428,80	93,38	105.069,90	90.675,40	86,30	106.867,00	105.560,80	98,78	108.443,05	98.357,38	90,70	99.342,92	130.526,10	131,39
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton/Tahun)	34.962,00	30.686,19	87,77	50.729,00	51.236,29	101,00	79.625,00	53.519,43	67,21	118.484,00	64.097,64	54,10	89.355,87	68.693,74	76,88
3	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)	9.999,00	11.900,00	119,01	10.499,00	12.793,69	121,86	11.024,00	26.152,00	237,23	11.575,00	20.227,63	174,75	14.787,49	28.510,15	192,80
4	Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	36,08	37,1	102,83	36,44	37,28	102,31	36,8	46,03	125,08	37,17	46,19	124,27	37,84	46,35	122,49
5	Peningkatan Produksi Benih Ikan (ekor)	36.331.017,00	38.614.000,00	106,28	50.378.304,00	52.128.900,00	103,47	75.642.454,00	42.868.450,00	56,67	109.208.664,00	76.708.194,00	70,24	110.356.881,00	76.708.194,00	69,51
6	Jumlah kasus IUU Fishing yang ditangani (kasus)	8	8	100,00	8,00	8,00	100,00	8	8	100,00	8	8	100,00	8	8	100,00
7	Jumlah Desa Kawasan Pesisir yang Diberdayakan (desa)	2	2	100,00	1,00	2,00	200,00	1	3	300,00	1	2	200,00	2	2	100,00
8	Jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan (orang)	171.996,00	187.240,00	108,86	174.109,00	187.427,00	107,65	177.984,00	219.253,00	123,19	182.835,00	187.615,00	102,61	187.802,00	187.615,00	99,90
9	Jumlah PAD sektor kelautan dan perikanan (Rp.)	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00				99.200.000,00	116.000.000,00	116,94	100.000.000,00	99.200.000,00	99,20	100.000.000,00	99.200.000,00	99,20
10	Jumlah LPPMHP yang terakreditasi (Lab)	1	0	0,00				1	0	0,00	1	1	100,00	1	1	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Penyusunan Program, 2016

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah

Beberapa wilayah perairan laut dan perairan umum daratan Kalimantan Tengah telah mengalami gejala *overfishing*. Selain itu, praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Kalimantan Tengah yang menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan dalam penanggulangan kegiatan *IUU fishing*.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ( $\pm$  80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai. Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan. Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Berdasarkan informasi dan uraian di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk menjadi lebih baik, analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Treat*) terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Kekuatan yang dimiliki:
  - Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
  - Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;
  - Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Kelautan dan Perikanan cukup memadai;
  - Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan
2. Peluang yang dimiliki:
  - Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  - Potensi sumber daya kelautan dan perikanan khususnya dalam bidang budidaya (laut, payau dan tawar) masih cukup luas;
  - Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk kelautan dan perikanan kondusif;
  - Kebutuhan produk kelautan dan perikanan di masyarakat cukup tinggi.
3. Kelemahan yang dimiliki:
  - Belum lengkap dan akuratnya *data-based* tentang kondisi dan potensi bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah;
  - Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
  - Belum tersedianya RZWP3K;
  - Lemahnya penegakan hukum;
  - Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik;
  - Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan belum didukung dengan perencanaan yang akurat;
  - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan masih rendah.
4. Ancaman yang dimiliki:
  - Penurunan sumberdaya ikan di perairan;
  - Pencemaran sumberdaya perairan;
  - Penyebaran penyakit ikan;
  - Perubahan cuaca/iklim imbas dari *global warming*;
  - Masih tingginya kegiatan *IUU* Fishing.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang kelautan dan Perikanan;
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan pelaku usaha perikanan secara optimal;
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal;
4. Optimalisasi sistem informasi database dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan;
5. Koodinasi internal maupun eksternal dilakukan secara intensif;
6. Meningkatkan konsolidasi internal;
7. Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat serta konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang kelautan dan perikanan sehingga dapat meningkatkan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang kelautan dan perikanan.

# Bab ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan perkebunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu : perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Kelautan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan kondisi obyektif saat ini dapat diidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan selanjutnya. Berbagai permasalahan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah ke depan seperti :

Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) di perairan laut dan di perairan umum daratan sebagai akibat kerusakan habitat ikan (mangrove), padat tangkap (*overfishing*) dan kerusakan lingkungan akibat praktek-praktek *Illegal Unreported Unregulated (IUU) fishing* yang kian marak terjadi baik di perairan laut maupun diperairan umum daratan, kerusakan lingkungan perairan juga disebabkan oleh pencemaran limbah baik industri serta limbah rumah tangga. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pengembangan kerjasama

secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan dalam penanggulangan kegiatan *IUU fishing*.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ( $\pm 80\%$ ), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha penangkapan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha penangkapan ikan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai. Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama nelayan yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan. Dalam kaitan ini, nelayan ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya tambak di wilayah pesisir, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Dalam hal pengelolaan wilayah laut, terdapat 4 dokumen yang seharusnya dimiliki yaitu Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP3K), dan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K). Sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyerahkan kewenangan pengelolaan wilayah laut mulai dari garis pantai sampai dengan 12 mil laut kepada provinsi. Tercatat di Tahun 2012, telah disusun Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2012. Langkah ideal selanjutnya adalah menyusun RZWP3K, yang mana sampai dengan akhir Tahun 2015, Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah yang selalu berusaha untuk dimantapkan melalui pembaharuan data dan konsultasi (publik dan teknis). Hal mengenai RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangatlah penting mengingat penataan ruang di darat berdasarkan RTRW harus sejalan dan selaras dengan RZWP3K. Pengaturan pemberian ijin pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung

di bawah permukaan laut, termasuk juga di bawah dasar laut harus berdasar kepada pedoman RZWP3K dimaksud.

### **3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 adalah : ***“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”***

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud yang telah ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu** : **Pemantapan tata ruang wilayah provinsi.** Misi ini bertujuan Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan sasaran terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
- Misi Kedua** : **Percepatan pembangunan infrastruktur.** Misi ini bertujuan Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketiga** : **Pengelolaan sumberdaya air, pesisir dan pantai.** Misi ini bertujuan meningkatkan pembangunan di daerah pesisir dan pantai dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan nelayan di daerah pesisir Kalimantan Tengah.
- Misi Keempat** : **Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.** Misi ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat Kalimantan Tengah.
- Misi Kelima** : **Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi.** Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di provinsi Kalimantan Tengah.

**Misi Keenam : Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran sektor pariwisata di provinsi Kalimantan Tengah.

**Misi Ketujuh : Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Tengah baik lingkungan kawasan hutan, perairan serta sumberdaya alam lainnya yang tidak terbarukan.

**Misi Kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan dihubungkan secara langsung kepada **Misi Ketiga** yaitu **Pengelolaan Sumberdaya Air, Pesisir dan Pantai** yang dalam RPJMD dijelaskan bahwa terkait potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah berupa garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas, dan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan, maka sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang serbesar-besarnya kepada seluruh *stakeholders* terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Daerah pesisir juga merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (*aquakultur*), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Manfaat ekosistem pantai sangat banyak, namun demikian tidak terlepas dari permasalahan lingkungan, sebagai akibat dari pemanfaatan

sumber daya alam di wilayah pantai. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perairan pantai, adalah pencemaran, erosi pantai, banjir, inturusi air laut, penurunan biodiversitas pada ekosistem mangrove dan rawa, serta permasalahan sosial ekonomi. Oleh karena itu di dalam pengelolaan daerah pesisir diperlukan suatu kajian keruangan mengingat perubahan ini bervariasi antar suatu tempat dengan tempat lain. Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan kelautan selama ini belum optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan pantai adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pantai antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain itu harus diperhatikan juga upaya pengawasan, serta pengendalian kerusakan pantai sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Pengendalian kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan dilakukan secara menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh.

Apabila ditarik mundur untuk mencari keterkaitan/ konsistensi muatan misi dalam RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 terhadap Misi RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 dan prinsip manfaat pembangunan, maka Misi Ketiga RPJMD dimaksudkan untuk mampu mengakomodir sasaran RPJPD Tahun 2005-2025, terutama **Misi 2** : *Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan*, dan **Misi 11** : *Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan*.

Dalam kaitannya terhadap RPJPD itu pula, Misi Ketiga RPJMD telah ditetapkan sasaran pembangunan yang harus dicapai yaitu **Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan (NTN)**. Jadi, M-3 ini secara tertulis menggariskan tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui indikator

Nilai Tukar Nelayan (NTN). Peningkatan kesejahteraan nelayan, dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sangat terkait erat dengan upaya meningkatkan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) demi mencapai ketahanan pangan yang berujung pada kemandirian pangan, terutama pangan yang berbasis pada hasil hasil perikanan. Dengan kemandirian pangan maka telah tercipta ketahanan pangan yang diharapkan dapat diimbangi dengan naiknya nilai produk perikanan, yang pada akhirnya nelayan dan pelaku perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan taraf kehidupannya.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni **“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”**, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh

*stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

**Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

**Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

**Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP adalah:

### **1. Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim**

- a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu
- b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional
- c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat
- d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan

- f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan

**2. Pemberantasan Perikanan Illegal/ IUU Fishing**

- a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.
- b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
- d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

**3. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan**

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan.
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

**4. Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan**

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi.
- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

**5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan**

- a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
- b. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
- c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
- d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
- e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah

dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundangundangan, serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita.

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

- 1) Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:
  - ❖ Memberantas *IUU Fishing*
  - ❖ Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi
  - ❖ Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi :
  - ❖ Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
  - ❖ Mengelola Sumberdaya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
  - ❖ Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap
  - ❖ Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD)
  - ❖ Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan
  - ❖ Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan
  - ❖ Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan
  - ❖ Merehabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut Membangun Kemandirian Pulau-Pulau Kecil
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi :
  - ❖ Memberi Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
  - ❖ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan Perikanan
  - ❖ Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan
  - ❖ Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
  - ❖ Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan, meliputi :

- 1) Penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya ikan yang diakibatkan aktivitas IUU (*illegal unreported unregulated*) *Fishing*, dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya yang tidak memperhatikan kaidah keberlanjutan (*sustainability*);
- 2) Rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pelaku utama perikanan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing;
- 3) Terbatasnya sarana pendukung disekitar kawasan sentra perikanan, misalnya PPI, pabrik/ gudang pakan, pos pengawasan;
- 4) Rendahnya kualitas dan kuantitas prasarana pendukung menuju dan/ atau dari kawasan potensial sentra perikanan, misalnya jalan, sarana transportasi lokal, listrik, pengairan, dan air bersih;
- 5) Belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur dan non- aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan non-teknis;

- 6) Kurang optimalnya upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagai akibat dari rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya pelaksanaan operasional pengawasan aparat pemerintah;
- 7) Masih rendahnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam mengisi pendapatan daerah;
- 8) Rendahnya investasi swasta dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
- 9) Tata ruang laut dan pesisir belum diatur dalam rencana zonasi wilayah laut dan pesisir.

# Bab IV

## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

### 4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 050/1356/Bapp Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016-2021, bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang merupakan pelaksanaan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 sesuai tugas dan fungsinya dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana Dinas Kelautan dan Perikanan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan melalui pembangunan kelautan dan perikanan selama 2016-2021 adalah:

***"Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah"***

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan dengan tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai induk organisasinya. Di dalam pernyataan visi tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan dengan rinci pencapaian organisasi Kelautan dan Perikanan di masa depan, yaitu ;

- 1) Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**, yakni mewujudkan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab serta Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
- 2) Berkelanjutan (*Sustainability*)**, yakni dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya
- 3) Ketahanan Pangan**, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

Visi di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Adapun Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

#### **1. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal**

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh, salah satunya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu dengan meningkatkan produksi dari sektor kelautan dan perikanan, baik produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Dengan meningkatkan produksi perikanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Pengelolaan kelautan dan perikanan yang berdaya saing maka pengembangan tersebut harus memiliki prospek yang cerah untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Walaupun masih dijumpai sejumlah kendala, dengan kerjasama berbagai pihak, diharapkan fishery industri memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fishery industri dapat menjadi lokomotif pertumbuhan nasional karena industri pengolahan perikanan mampu mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, yang akhirnya akan memperkuat daya saing produk. Selain itu fishery industri juga memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar sehingga dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian nasional. Fishery industri memiliki keterkaitan yang besar baik industri hulu maupun hilir, sehingga mampu menarik kemajuan sektor lainnya, salah satu cara yang tepat dan cepat untuk meningkatkan nilai tambah produk adalah dengan cara pengembangan industrialisasi di sektor kelautan dan perikanan. Pengaruh globalisasi dalam dunia industri saat ini telah menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan dituntut untuk dapat terus berkembang sehingga mampu menghadapi persaingan yang ada. Kemampuan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan satu hal yang sangat penting. Kemampuan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tingkat mutu yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat mutu yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat terpenuhinya kebutuhan yang biasa dinyatakan oleh tingkat kepuasan masyarakat. Tetapi apabila terdapat kesenjangan antara tingkat mutu yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan kebutuhan masyarakat, maka akan timbul ketidakpuasan masyarakat yang merupakan masalah mutu yang dapat mengakibatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah diharuskan untuk meningkatkan kualitas produk secara terus menerus dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

### 3. Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Aktifitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan lautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusak sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.

Melihat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan lain yang timbul adalah maraknya kegiatan IUU *fishing* yang berdampak merugikan dan mengancam kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Ancaman *illegal fishing* kedepan intensitasnya cenderung meningkat, hal tersebut sejalan dengan kondisi perikanan global saat ini di beberapa daerah yang mengalami penurunan stok ikan dan tingginya kebutuhan produk perikanan. Melihat ancaman dan tantangan tersebut maka diperlukan pengembangan pemantauan dari bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), penyediaan sarana prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan ditingkat daerah serta kerjasama secara intensif dengan instansi lain dan menggalang komitmen serta dukungan lintas sektor dalam penanggulangan *illegal fishing*.

**Gambar 4.1 Hubungan Visi dan Misi**



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa untuk menjamin terwujudnya visi dinas kelautan dan perikanan, dibutuhkan 3 (tiga) misi. Pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal merupakan misi utama agar sumberdaya yang tersedia dapat betul-betul termanfaatkan oleh nelayan dan pembudidaya, selanjutnya dukungan misi kedua yaitu peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sedang misi ketiga peningkatan upaya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan upaya pengelolaan dalam hal pemanfaatan sumberdaya supaya tetap dapat dimanfaatkan secara terus-menerus (*sustainable*).

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama adalah Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
  - Meningkatkan produksi perikanan budidaya
2. Misi Kedua adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan.

3. Misi Ketiga adalah Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dapat ditarik sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Arah dari misi pertama adalah Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal, memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai misi tersebut yaitu :
  - a. Tujuan pertama, Meningkatkan produksi perikanan tangkap. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah produksi perikanan tangkap (indikator : produksi perikanan tangkap dalam ton/tahun).
  - b. Tujuan kedua, Meningkatkan produksi perikanan budidaya. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi benih (indikator : produksi perikanan budidaya dalam ton/tahun dan produksi benih dalam ekor/tahun).
2. Arah dari misi kedua adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai misi tersebut yaitu :
  - a. Tujuannya adalah Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan. Tujuan tersebut di capai dengan sasaran: angka konsumsi ikan (indikator : konsumsi ikan masyarakat Kg/Kapita/tahun)
3. Arah dari misi ketiga adalah Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai misi tersebut yaitu :
  - a. Tujuan pertama, Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Dokumen kebijakan pengelolaan wilayah

pesisir dan laut, jumlah luasan konservasi perairan dan jumlah luasan rehabilitasi kawasan (indikator : dokumen, luasan konservasi perairan dalam ha/tahun dan luasan rehabilitasi kawasan pesisir ha/tahun);

- b. Tujuan kedua, Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku dan POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (indikator : persentase dan jumlah POKMASWAS)

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1. Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>Visi: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah</b>										
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Misi 1: Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal</b>										
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi (Ton/tahun)	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1
2	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi (Ton/tahun)	68.693,70	74.854,47	85.173,26	97.276,39	110.842,40	116.384,52	119.876,05
			Jumlah Produksi Benih (Ekor/tahun)	55.620 ribu	57.330 ribu	59.500 ribu	61.343 ribu	64.410 ribu	67.630 ribu	70.335 ribu
<b>Misi 2: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</b>										
3	Meningkatkan Konsumsi Terhadap Produk Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan/Kap/ Tahun	46,35	47,09	47,59	48,10	48,61	49,12	49,63
<b>Misi 3: Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>										
4	Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1

		Luasan Konservasi Perairan	Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha/tahun)	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679
		Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir (Ha/tahun)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
5	Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	70	70	75	78	80	85	87
		POKMASWA S yang berperan dalam kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (kelompok/ tahun)	22	22	25	30	40	40	40

### **4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

<b>Visi: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah</b>				
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi 1: Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal</b>				
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan Tangkap	Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan dan perbaikan sarana dan prasarana perikanan tangkap</li> <li>2. Pengelolaan sumber daya ikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan tangkap</li> </ol>
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya dan produksi benih	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi konsumsi ikan masyarakat dengan sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi benih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan sarana prasarana untuk menunjang produksi perikanan budidaya</li> <li>2. Peningkatan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan perbenihan pada UPTD/UPR</li> </ol>
<b>Misi 2: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</b>				
1.	Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan	Angka konsumsi ikan	Peningkatan rata-rata konsumsi ikan masyarakat secara merata dan berimbang	Memasyarakatkan konsumsi ikan dan produk olahannya melalui pengembangan dan pengolahan usaha pengolahan perikanan
<b>Misi 3: Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>				
1.	Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, jumlah luasan konservasi perairan dan jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir	Penataan dan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir secara berkelanjutan dan lestari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen kebijakan pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut</li> <li>2. Pengelolaan dan penataan kawasan konservasi</li> </ol>

**Visi: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				3. Rehabilitasi pantai
2.	Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku dan jumlah POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP	Meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Sosialisasi dan pembinaan dalam penegakan hukum dan pengendalian <i>IUU</i> 2. Pembinaan POKMASWAS

Tabel 4.3. Hubungan Program, Kegiatan dan Indikator Hasil Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

<b>Visi : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah</b>			
<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Hasil</b>
1	<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap</b>		<b>Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)</b>
		Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan laut	<i>Jumlah sarana dan prasarana nelayan di perairan laut yang meningkat kapasitas sarananya</i>
		Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan umum daratan (PUD)	<i>Jumlah sarana dan prasarana nelayan di perairan umum daratan yang meningkat kapasitas sarananya</i>
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	<i>Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat sarana dan prasarana</i>
		Monitoring Evaluasi Sumberdaya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	<i>Jumlah Kelompok pengelola SDI yang di Monev</i>
		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan pengelolaan perairan umum daratan dan laut	<i>Jumlah kelompok pengelola PUD dan perairan laut yang dibentuk dan yang dikuatkan kelambagaannya</i>
		Pembinaan perizinan usaha perikanan tangkap	<i>Jumlah ijin usaha perikanan tangkap yang dibina</i>
		Pengembangan habitat dan perlindungan sumberdaya ikan	<i>Jumlah SDI yang dikembangkan melalui restocking</i>
2	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya</b>		<b>Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)</b>

		Pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba	<i>Jumlah kawasan budidaya kolam dan keramba yang berkembang</i>
		Pengembangan usaha pakan ikan skala mini (Gerakan Pakan Mandiri)	<i>Jumlah mesin pakan ikan skala mini yang tersedia</i>
		Pengembangan Budidaya ikan di kawasan Minapoitan	<i>Jumlah kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya yang dikembangkan</i>
		Pengembangan Budidaya ikan lokal khas Kalteng	<i>Jumlah Ikan Lokal khas Kalteng yang dikembangkan</i>
		Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil	<i>Jumlah kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang diberdayakan</i>
		Pengembangan dan peningkatan mutu UPTD/UPR	<i>Jumlah UPR/UPTD yang dikembangkan</i>
		Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional BBIP Ujung Pandaran	<i>Jumlah produksi benih ikan pantai yang diproduksi</i>
		Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional BBUG Kumai	<i>Jumlah benih Udang Galah yang diproduksi</i>
		Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional BBIS Talohen	<i>Jumlah benih ikan/calon induk yang dihasilkan</i>
		Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional SPIL Tangkiling	<i>Jumlah benih ikan yang diproduksi</i>
3	<b>Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan</b>		<b>Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)</b>
		Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil	<i>Jumlah Unit Usaha pengolahan skala kecil yang berkembang</i>
		Gerakan memasyarakatkan makan ikan	<i>Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam gerakan memasyarakatkan makan ikan</i>

		Pameran dan promosi produk hasil perikanan	<i>Jumlah pameran dan promosi produk kelautan dan perikanan yang diikuti</i>
		Operasi pasar	<i>Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan</i>
		Sertifikasi kelayakan pengolahan bagi unit pengolahan ikan	<i>Jumlah unit pengolahan ikan yang disertifikasi</i>
		Pengembangan ragam produk olahan bernilai tambah	<i>Jumlah ragam produk olahan hasil perikanan yang dikembangkan</i>
4	<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir</b>		<b><i>Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut (dokumen); Jumlah luasan konservasi perairan (Ha); Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)</i></b>
		Penyusunan peraturan daerah zonasi WP3K Provinsi	<i>Jumlah perda RZWP3K yang diselesaikan</i>
		Penyusunan Dokumen Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang diselesaikan</i>
		Pencadangan kawasan konservasi perairan darat dan laut	<i>Jumlah kawasan perairan dan jenis yang di konservasi</i>
		Peningkatan sarana dan prasarana di wilayah pesisir	<i>Jumlah sarana dan prasarana di kawasan pesisir yang tersedia</i>
		Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan konservasi	<i>Jumlah sarana dan prasarana di kawasan konservasi yang tersedia</i>
		Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	<i>Luasan kawasan konservasi yang dikelola secara terpadu (Ha)</i>
		Pantai berseri	<i>Jumlah kawasan pesisir menjadi berseri</i>

5	<b>Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>		<i>Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%); Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)</i>
		Peningkatan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	<i>Jumlah sarana dan prasarana pengawasan yang tersedia</i>
		Peningkatan upaya penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	<i>Jumlah kasus pelanggaran bidang SDKP yang ditangani</i>
		Forum koordinasi penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan	<i>Koordinasi penanganan dan penyelesaian tindak pidana bidang KP</i>
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	<i>Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian SDKP</i>

**Bab**
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,  
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN  
DAN PENDANAAN INDIKATIF**
**5.1. Program Prioritas**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

**1. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan melalui :

- a) Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan laut;
- b) Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan Perairan Umum Daratan (PUD);
- c) Peningkatan Sarana dan Parasarana Pelabuhan Perikanan
- d) Monitoring Evaluasi Sumberdaya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI
- e) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut
- f) Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
- g) Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan

**2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dengan sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi benih ikan, untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan melalui :

- a) Pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba
- b) Pengembangan Usaha Pakan Ikan Skala Mini (Gerakan Pakan Mandiri)
- c) Pengembangan Budidaya ikan di kawasan Minapolitan
- d) Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Khas Kalteng
- e) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil
- f) Pengembangan dan Peningkatan Mutu UPTD/UPR
- g) Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBIP Ujung Pandaran
- h) Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBUG Kumai
- i) Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBIS Talohen
- j) Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional SPIL Tangkiling

**3. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan**

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan rata-rata konsumsi ikan masyarakat secara merata dan berimbang, untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut diatas, kegiatan yang akan dilaksanakan melalui :

- a) Pengembangan usaha pengolahan Perikanan skala kecil
- b) Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
- c) Pameran dan Promosi Produk Hasil Perikanan
- d) Operasi Pasar
- e) Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Bagi Unit Pengolahan Ikan
- f) Pengembangan Ragam Produk Olahan Bernilai Tambah

**4. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir**

Program ini dimaksudkan untuk penataan dan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir secara berkelanjutan dan lestari, untuk mencapai tujuan program tersebut, dilaksanakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Penyusunan Peraturan Daerah zonasi WP3K Provinsi
- b) **Penyusunan Dokumen Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut**
- c) Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Darat dan Laut
- d) Peningkatan Sarana dan Prasarana di Wilayah Pesisir
- e) Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kawasan Konservasi
- f) **Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah**
- g) Pantai Berseri

**5. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta peningkatan dan penguatan SDM pengawasan kelautan dan perikanan, sedangkan sasaran jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bidang Kelautan dan Perikanan yang aktif, dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Peningkatan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan
- c) Forum koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan
- d) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

**5.2. Indikator Kerja**

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Program Prioritas, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Akhir Pencapaian**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Akhir (2021)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>1. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap</b>	<b>Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)</b>	<b>130.526,1</b>
1.1. Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan laut	<i>Jumlah sarana dan prasarana nelayan diperairan laut yang meningkat kapasitas sarananya</i>	40 Kapal dan 3.250 piece
1.2. Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan Perairan Umum Daratan (PUD)	<i>Jumlah kelompok nelayan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang meningkat kapasitas sarananya</i>	80 Buah
1.3. Peningkatan Sarana dan Parasarana Pelabuhan Perikanan	<i>Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat sarana dan prasarana</i>	7 PPI

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Akhir (2021)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.4. Monitoring Evaluasi Sumberdaya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	<i>Jumlah kelompok pengelola SDI yang di Monev.</i>	14 kawasan
1.5. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut	<i>Jumlah kelompok pengelola PUD dan Perairan Laut yang dibentuk dan yang dikuatkan kelembagaannya</i>	19 Kelompok
1.6. Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	<i>Izin usaha perikanan tangkap yang dibina</i>	82 Izin
1.7. Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan	<i>Jumlah SDI yang dikembangkan melalui restocking</i>	2.283.992 ekor
<b>2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya</b>	<b><i>Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)</i></b>	<b>119.876,05</b>
2.1. Pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba	<i>Jumlah Kawasan Budidaya Kolam dan Budidaya keramba yang berkembang</i>	14 kawasan kolam; 12 kawasan keramba
2.2 Pengembangan Usaha Pakan Ikan Skala Mini (Gerakan Pakan Mandiri)	<i>Jumlah mesin pakan ikan skala mini yang tersedia</i>	50 unit mesin pakan skala Mini
2.3 Pengembangan Budidaya ikan di kawasan Minapolitan	<i>Jumlah kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya yang dikembangkan</i>	10 Kawasan Minapolitan
2.4 Pengembangan budidaya ikan lokal khas Kalteng	<i>Jumlah ikan lokal khas Kalteng yang dikembangkan</i>	3 jenis ikan lokal (betok, lele dan ikan gabus)
2.5 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil	<i>Jumlah kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang diberdayakan</i>	29 kelompok
2.6 Pengembangan dan Peningkatan Mutu UPTD/UPR	<i>Jumlah UPR/UPTD yang dikembangkan</i>	3 Komoditas di UPR/UPTD
2.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBIP Ujung Pandaran	<i>Jumlah produksi Benih ikan pantai yang diproduksi</i>	1.350. 000 ekor
2.8 Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBUGKumai	<i>Jumlah Benih Udang Galah yang di produksi</i>	1.350.000 ekor
2.9 Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional BBIS Talohen	<i>Jumlah benih ikan/calon induk yang dihasilkan</i>	1.350.000 ekor
2.10 Peningkatan Sarana dan Prasarana dan operasional SPIL Tangkiling	<i>Jumlah benih Ikan yang diproduksi</i>	2.700.000 ekor

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir (2021)
(1)	(2)	(3)
<b>3 Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)</b>	<b>49,63</b>
3.1 Pengembangan usaha pengolahan Perikanan skala kecil	Jumlah unit usaha pengolahan skala kecil yang berkembang	9 unit usaha
3.2 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam gerakan memasyarakatkan makan ikan	750 orang
3.3 Pameran dan Promosi Produk Hasil Perikanan	Jumlah pameran dan promosi produk kelautan dan perikanan yang diikuti	5 kali
3.4 Operasi Pasar	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	12 bulan
3.5 Sertifikasi kelayakan pengolahan bagi unit pengolahan ikan	Jumlah unit pengolahan ikan yang disertifikasi	12 unit
3.6 Pengembangan Ragam produk olahan bernilai tambah	Jumlah ragam produk olahan hasil perikanan yang dikembangkan	12 ragam olahan
<b>4 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir</b>	<b>Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut (dokumen); Jumlah luasan konservasi perairan (Ha); Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)</b>	<b>1 dokumen; 171.679 Ha; 2,5 Ha</b>
4.1 Penyusunan Peraturan Daerah Zonasi WP3K Provinsi	Jumlah dokumen RZWP3K yang diselesaikan	1 dokumen
4.2 Penyusunan Dokumen Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	Jumlah dokumen kebijakan pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut	2 dokumen
4.3 Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Darat dan Laut	Jumlah kawasan perairan dan jenis yang di konservasi	171.699 Ha
4.4 Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan pesisir	Jumlah sarana dan prasarana di kawasan pesisir yang tersedia	4 Desa Pesisir
4.5 Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan konservasi	Jumlah sarana dan prasarana di kawasan konservasi yang tersedia	1 Sarpras Kawasan Konservasi
4.6 Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	Kawasan konservasi yang dikelola secara terpadu (Ha)	1 kawasan
4.7 Pantai berseri	Kawasan pesisir menjadi berseri	5 Desa Pesisir

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Akhir (2021)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>5 Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b><i>Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%);Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)</i></b>	<b>87%; 40 kelompok</b>
5.1 Peningkatan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	<i>Jumlah sarana dan prasarana pengawasan yang tersedia</i>	73
5.2 Peningkatan Upaya Pegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	<i>Jumlah kasus pelanggaran bidang SDKP yang ditangani</i>	21 kasus
5.3 Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan	<i>Koordinasi penanganan dan penyelesaian tindak pidana bidang kelautan dan perikanan</i>	10
5.4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<i>Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian SDKP</i>	126 POKMASWAS

### **5.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Nelayan
2. Pembudidaya ikan
3. Pengolahan dan pemasar hasil perikanan
4. Perusahaan Swasta kelautan dan perikanan
5. Petugas baik provinsi dan kabupaten/kota

### **5.4 Pendanaan Indikatif**

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat.

**Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2021)			
						TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi (Ton/ tahun)	<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap</b>	Jumlah Produksi (Ton/tahun)	130.526,1	130.526,1	1.673.740	130.526,1	13.644.530	130.526,1	14.300.937	130.526,1	15.212.008	130.526,1	15.968.186	130.526,1	24.542.416	Bidang Perikanan Tangkap	
			Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan laut	<i>Jumlah sarana dan prasarana nelayan di perairan laut yang meningkat kapasitas sarannya</i>															
			Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan umum daratan (PUD)	<i>Jumlah sarana dan prasarana nelayan di perairan umum daratan yang meningkat kapasitas sarannya</i>															
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	<i>Jumlah Pelabuhan Perikanan yang meningkat sarana dan prasarana</i>															
			Monitoring Evaluasi Sumberdaya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	<i>Jumlah kelompok pengelola SDI yang di Monev</i>															
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan pengelolaan perairan umum daratan dan laut	<i>Jumlah kelompok pengelola PUD dan perairan laut yang dibentuk dan yang dikuatkan kelembagaannya</i>															
			Pembinaan perizinan usaha perikanan	<i>Jumlah ijin usaha perikanan tangkap yang</i>															

**RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2021)			
						TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			tangkap	<i>dibina</i>															
			Pengembangan habitat dan perlindungan sumberdaya ikan	<i>Jumlah SDI yang dikembangkan melalui restocking</i>															
Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi (Ton/tahun); Jumlah Produksi Benih (Ekor/tahun)	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya</b>	<b>Jumlah Produksi (Ton/tahun); Jumlah Produksi Benih (Ekor/tahun)</b>	68.693,70; 55.620 ribu	74.854,47; 57.330 ribu	3.865.223	85.173,26; 59.500 ribu	5.245.195	97.276,39; 61.343 ribu	3.267.111	110.842,40; 64.410 ribu	4.163.506	116.384,52; 67.630 ribu	5.000.708	119.876,05; 70.335 ribu	1.371.791	Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran	
			Pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba	<i>Jumlah kawasan budidaya kolam dan keramba yang berkembang</i>															
			Pengembangan usaha pakan ikan skala mini (Gerakan Pakan Mandiri)	<i>Jumlah mesin pakan ikan skala mini yang tersedia</i>															
			Pengembangan Budidaya ikan di kawasan Minapoitan	<i>Jumlah kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya yang dikembangkan</i>															
			Pengembangan Budidaya ikan lokal khas Kalteng	<i>Jumlah Ikan Lokal khas Kalteng yang dikembangkan</i>															
			Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil	<i>Jumlah kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang diberdayakan</i>															
			Pengembangan dan peningkatan mutu UPTD/UPR	<i>Jumlah UPR/UPTD yang dikembangkan</i>															
			Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional BBIP	<i>Jumlah produksi benih ikan pantai yang diproduksi</i>															

**RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2021)			
						TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Ujung Pandaran																
			Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional BBUG Kumai	Jumlah benih Udang Galah yang diproduksi															
			Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional BBIS Talohen	Jumlah benih ikan/calon induk yang dihasilkan															
			Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional SPIL Tangkiling	Jumlah benih ikan yang diproduksi															
Meningkatkan Konsumsi Terhadap Produk Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan/Kap/ Tahun	<b>Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)</b>	46,35	47,09	685.595.	47,59	368.000	48,10	896.058	48,61	913.244	49,12	1.256.166	49,63	3.311.785	Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran	
			Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil	Jumlah Unit Usaha pengolahan skala kecil yang berkembang															
			Gerakan memasyarakatkan makan ikan	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam gerakan memasyarakatkan makan ikan															
			Pameran dan promosi produk hasil perikanan	Jumlah pameran dan promosi produk kelautan dan perikanan yang diikuti															
			Operasi pasar	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan															
			Sertifikasi kelayakan	Jumlah unit pengolahan ikan															

**RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2021)			
						TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			pengolahan bagi unit pengolahan ikan	yang disertifikasi															
			Pengembangan ragam produk olahan bernilai tambah	Jumlah ragam produk olahan hasil perikanan yang dikembangkan															
Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut; Luasan Konservasi Perairan; Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Dokumen); Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha/tahun); Jumlah Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir (Ha/tahun)	<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir</b>	<b>Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut (dokumen); Jumlah luasan konservasi perairan (Ha); Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)</b>	1; 171.679; 2,5	1; 171.679; 2,5	814.200	1; 171.679; 2,5	790.000	1; 171.679; 2,5	927.446	1; 171.679; 2,5	1.116.531	1; 171.679; 2,5	1.460.761	1; 171.679; 2,5	3.999.314	Bidang Kelautan dan Pesisir	
			Penyusunan peraturan daerah zonasi WP3K Provinsi	Jumlah perda RZWP3K yang diselesaikan															
			Penyusunan Dokumen Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang diselesaikan															
			Pencadangan kawasan konservasi perairan darat dan laut	Jumlah kawasan perairan dan jenis yang di konservasi															
			Peningkatan sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana di															

**RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2021)			
						TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			prasarana di wilayah pesisir	<i>kawasan pesisir yang tersedia</i>															
			Peningkatan sarana dan prasarana di kawasan konservasi	<i>Jumlah sarana dan prasarana di kawasan konservasi yang tersedia</i>															
			Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	<i>Luasan kawasan konservasi yang dikelola secara terpadu (Ha)</i>															
			Pantai berseri	<i>Jumlah kawasan pesisir menjadi berseri</i>															
Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku; POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan Pengawas SDKP	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%); Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (kelompok/ tahun)	<b>Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang patuh ketentuan/ UU yang berlaku (%); Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)</b>	70; 22	70; 22	515.800	75; 25	280.000	78; 30	653.446	80; 40	758.656	85; 40	965.634	87; 40	1.917.715	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
			Peningkatan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	<i>Jumlah sarana dan prasarana pengawasan yang tersedia</i>															
			Peningkatan upaya penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	<i>Jumlah kasus pelanggaran bidang SDKP yang ditangani</i>															
			Forum koordinasi penanganan tindak pidana	<i>Koordinasi penanganan dan penyelesaian</i>															

**RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	DATA CAPAIAN 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2016		2017		2018		2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2021)			
						TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000	TARGET	Rp.000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			bidang kelautan dan perikanan	<i>tindak pidana bidang KP</i>															
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	<i>Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian SDKP</i>															

**Tabel 5.3 Pendanaan Indikatif untuk tiap-tiap program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2016-2021**

Program	Tahun Pendanaan Indikatif (Rp 000,-)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	2.285.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.250.000
2. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	660.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	575.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.500.000
4. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	375.000	2.100.000	2.500.000	2.750.000	3.500.000
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	3.292.500	5.500.000	6.000.000	6.750.000	7.500.000
6. Program Peningkatan kompetensi laboratorium perikanan	113.000	500.000	750.000	750.000	800.000
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.095.159	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.950	250.000	300.000	325.000	400.000
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	110.000	120.000	150.000	160.000	200.000
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000	75.000	100.000	100.000	150.000
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	462.000	550.000	600.000	650.000	750.000
12. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	75.000	100.000	125.000	130.000	150.000
<b>Jumlah</b>	<b>9.336.609</b>	<b>18.095.000</b>	<b>21.025.000</b>	<b>23.665.000</b>	<b>27.100.000</b>

## Bab VI **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:

**Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton/Tahun)	68.693,7	74.854,47	85.173,26	97.276,39	110.842,40	116.384,52	119.876,05
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/Tahun)	130.526,1	130.656,6	130.787,3	130.918,1	131.049,0	131.180,0	131.311,2
3	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/ Tahun)	51,23	51,89	52,31	52,78	53,30	53,73	54
4	Jumlah Produksi Benih Ikan (ekor)	55.620 ribu	57.330 ribu	59.500 ribu	61.343 ribu	64.410 ribu	67.630 ribu	70.335 ribu
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	70	70	75	78	80	85	87
6	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (Kelompok)	22	22	22	25	30	40	40
7	Jumlah Luasan Konservasi perairan (Ha/tahun)	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679
8	Luasan Kawasan Pesisir yang direhabilitasi (Ha/Thn)	2,5	2,5	5	7,5	10	10	15
9	Dokumen kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1

## **Bab VII** PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Prioritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dalam periode 2016-2021. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.